



# RENCANA STRATEGIS BALAI BAHASA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020–2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
BALAI BAHASA PROVINSI PAPUA  
2022



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BALAI BAHASA  
PROVINSI PAPUA**

Jalan Yoka, Waena, Heram, Jayapura, Papua 99358  
Telepon (0967) 574154, 574171  
Laman [balaibahasapapua.kemdikbud.go.id](http://balaibahasapapua.kemdikbud.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI PAPUA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 494/I5.17/PR.00.02/2022  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
BALAI BAHASA PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2020—2024**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI PAPUA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Papua, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu menetapkan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Papua Tahun 2020—2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tentang Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Papua Tahun 2020—2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

## BALAI BAHASA PROVINSI PAPUA

Jalan Yoka, Waena, Heram, Jayapura, Papua 99358

Telepon (0967) 574154, 574171

Laman [balaibahasapapua.kemdikbud.go.id](http://balaibahasapapua.kemdikbud.go.id)

---

- Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005—2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BALAI BAHASA  
PROVINSI PAPUA**

Jalan Yoka, Waena, Heram, Jayapura, Papua 99358

Telepon (0967) 574154, 574171

Laman [balaibahasapapua.kemdikbud.go.id](http://balaibahasapapua.kemdikbud.go.id)

---

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI PAPUA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BAHASA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020—2024.**

**KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Papua Tahun 2020—2024, yang selanjutnya disebut Renstra Balai Bahasa Provinsi Papua 2020—2024, yang merupakan dokumen perencanaan Balai Bahasa Provinsi Papua untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua ini.

**KEDUA** : Renstra Balai Bahasa Provinsi Papua 2020— 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Balai Bahasa Provinsi Papua dalam penyusunan kegiatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

**KETIGA** : Renstra Balai Bahasa Provinsi Papua 2020— 2024 termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Balai Bahasa Provinsi Papua yang merupakan dokumen Balai Bahasa Provinsi Papua untuk periode 1 (satu) tahun.

**KEEMPAT** : Renstra Balai Bahasa Provinsi Papua 2020— 2024 dipergunakan sebagai pedoman bagi Balai Bahasa Provinsi Papua untuk penetapan Rencana Kerja Balai Bahasa Provinsi Papua dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Balai Bahasa Provinsi Papua Tahun 2020—2024.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BALAI BAHASA  
PROVINSI PAPUA**

Jalan Yoka, Waena, Heram, Jayapura, Papua 99358  
Telepon (0967) 574154, 574171  
Laman [balaibahasapapua.kemdikbud.go.id](http://balaibahasapapua.kemdikbud.go.id)

- KELIMA** : Seluruh pegawai di Balai Bahasa Provinsi Papua melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renstra Balai Bahasa Provinsi Papua 2020—2024 yang telah dituangkan dalam Renja Balai Bahasa Provinsi Papua.
- KEENAM** : Renstra Balai Bahasa Provinsi Papua 2020—2024 dapat diubah dan disesuaikan sepanjang:
- terdapat peraturan dan/atau kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengamanatkan perubahan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; atau
  - adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 14 Juni 2022

Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua,



*Muis*  
Drs. Muhammad Muis, M.Hum.  
NIP 196901031993031002

# KATA PENGANTAR



Drs. Muhammad Muis, M.Hum.  
Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua

Puji syukur ke hadirat Allah Swt., atas rahmat dan karunia-Nya, penyempurnaan dan penyelarasan Rencana Strategis (Renstra) Balai Bahasa Provinsi Papua Tahun 2020—2024 dapat diselesaikan dengan baik. Penyempurnaan dan penyelarasan Renstra ini mengacu pada Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024.

Rencana strategis ini juga disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tujuh tahun (periode 2015—2019 dan 2020—2021) agar lebih adaptif terhadap perubahan situasi, kondisi, dan kebijakan. Selanjutnya, inovasi dan strategi pelaksanaan program dan anggaran dilaksanakan sesuai dengan tuntutan organisasi.

Sebagai salah satu UPT yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Papua melalui Moto “Melayani dengan PAPEDA” mendukung tiga program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu (1) Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan, (2) Pelindungan bahasa dan sastra daerah, dan (3) Internasionalisasi bahasa Indonesia. Strategi pelaksanaan kegiatan melalui pendekatan Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) terus diperkuat agar program dan kegiatan pada sisa tahun Renstra (2022—2024) dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Renstra BPP Bahasa Tahun 2020—2024 akan menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa agar fungsi pengembangan,



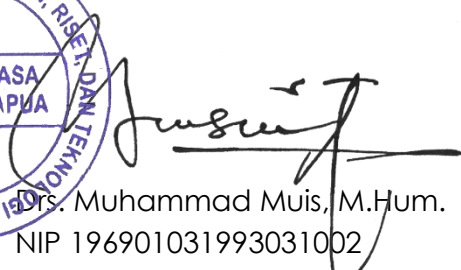
pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Indonesia berhasil sesuai dengan target yang ditetapkan guna mendukung pembangunan nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Jayapura, 14 Juni 2022

Kepala Balai Bahasa

Provinsi Papua,



  
Dr. Muhammad Muis, M.Hum.  
NIP 196901031993031002



# DAFTAR ISI

SK Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua	ii
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Kondisi Umum	5
1.2 Pokok-Pokok Perubahan dalam Renstra BBP Papua 2020—2024	9
1.3 Potensi dan Permasalahan	11
<b>BAB II TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>15</b>
2.1 Visi	16
2.2 Misi	16
2.3 Tujuan BPP Bahasa	17
2.4 Sasaran Strategis	17
2.5 Sasaran Program	18
2.6 Tujuan Kegiatan	19
2.7 Sasaran Kegiatan	20
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	<b>24</b>
3.1 Arah Kebijakan	25
3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	25
3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	27
3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	31
3.1.3.1 Arah Kebijakan BPP Bahasa	31
3.1.3.2 Strategi Pelaksanaan Program	35
3.1.3.3 Program dan Kegiatan Prioritas	38
3.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Bahasa Provinsi Papua	43
3.2 Kerangka Regulasi	45
3.3 Kerangka Kelembagaan	47
3.3.1 Struktur Organisasi	48
3.3.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia	49
3.3.3 Reformasi Birokrasi	50
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	<b>52</b>
4.1 Target Kinerja	53
4.1.1 Sasaran dan Indikator Tahun 2020—2021	53
4.1.2 Sasaran dan Indikator Tahun 2022—2024	54
4.2 Kerangka Pendanaan	55
4.2.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2020—2021	56
4.2.2 Sasaran dan Indikator Tahun 2022—2024	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>60</b>
- Definisi Operasional	61
- Cascading	72
- Matriks Semula-Menjadi Sasaran dan Indikator	74





# BAB I

## PENDAHULUAN



## **“Kami Poetra dan Poetri Indonesia Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia” (Butir Ketiga Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928)**

Bahasa dan sastra Indonesia merupakan salah satu pembentuk jati diri keindonesiaan. Kehendak bersatu sebagai syarat keberadaan bangsa yang telah disepakati pada tanggal 28 Oktober 1928 juga terwujud dalam bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Anasir bahasa dipilih sebagai lambang kesatuan negara bangsa Indonesia yang bermartabat. Dalam perkembangan sejarahnya, posisi bahasa Indonesia ini kemudian diperkukuh dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan, undang-undang turunannya, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, telah memosisikan bahasa sejajar dengan simbol kenegaraan yang lain, seperti bendera, lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Di tengah kekukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, pluralisme dan multilingualisme di Indonesia perlu dikelola untuk mendukung pembangunan nasional. Pengelolaan tersebut dapat dilaksanakan melalui trigatra kebahasaan, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Bahasa Indonesia harus semakin mantap sebagai peneguh identitas bangsa dan penyatu keberagaman suku dan/atau ras di Indonesia. Bahasa daerah harus mampu membentuk generasi muda Indonesia yang sadar akan kekayaan tradisi dan budayanya. Sementara itu, bahasa asing harus mampu menyiapkan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di dunia internasional.

Kemampuan berbahasa Indonesia, berbahasa daerah, dan berbahasa asing merupakan kemampuan ideal manusia Indonesia untuk dapat berkompetisi secara global dengan mengikuti perkembangan kemutakhiran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). Salah satu pembentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul adalah peningkatan kompetensi berbahasa penuturnya, baik secara lisan, tulis, maupun isyarat. Hal



tersebut selaras dengan dua misi presiden, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia dan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Pembangunan SDM yang dimaksud dalam arahan presiden itu: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global. Arahan presiden tersebut selaras dengan agenda pembangunan 3, yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

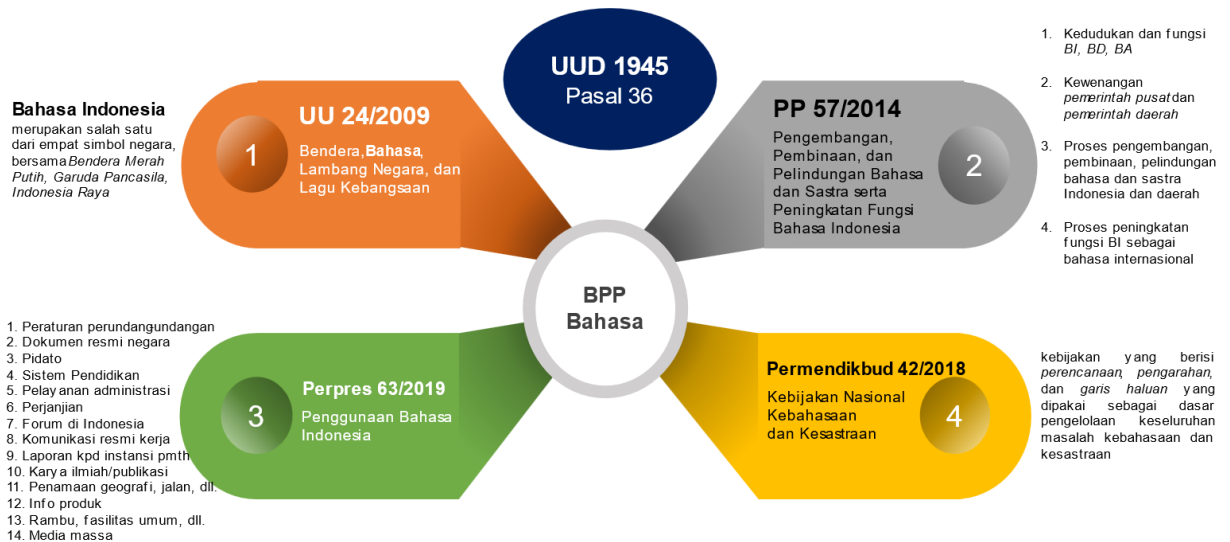
Selain agenda pembangunan SDM, agenda pembangunan 4 (revolusi mental dan pembangunan kebudayaan) juga menjadi salah satu agenda penting yang harus dilaksanakan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: *bhinneka tunggal ika*. Untuk memperkuat *bhinneka tunggal ika*, kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial kemasyarakatan.

Sehubungan dengan itu, pembangunan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan memerlukan perencanaan strategis dan terstruktur. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa) sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra merupakan lembaga strategis dalam melaksanakan amanah Agenda Pembangunan 4, yaitu revolusi mental dan pemajuan kebudayaan.

Dalam melaksanakan agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Renstra Kemendikbudristek, dan Renstra BPP Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Papua berpedoman pada amanat regulasi tentang pengelolaan bahasa sebagai berikut.



## Amanat Regulasi tentang Pengelolaan Bahasa



Selanjutnya, dalam melaksanakan amanah perundangan-undangan, Balai Bahasa Provinsi Papua melaksanakan tugas dan fungsi dengan sasaran, indikator, dan target kinerja sebagaimana diamankan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, terdapat beberapa kebijakan baru yang mendorong Balai Bahasa Provinsi Papua melakukan penyelarasan dan penyempurnaan rencana strategis, yaitu

1. Perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kemendikbudristek berdasarkan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Perubahan rencana strategis Kemendikbudristek berdasarkan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
3. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) berdasarkan surat edaran bersama Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan a.n.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 dan Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan RI Nomor S-122/MK.2/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

Renstra Balai Bahasa Provinsi Papua ini disusun sesuai dengan pedoman teknis penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga yang diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024.

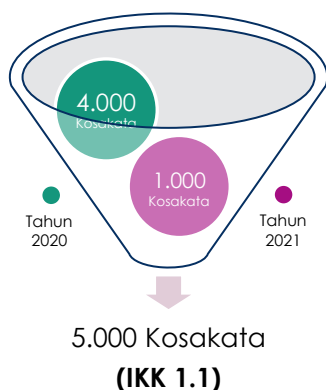
Rencana strategis ini lebih mengkrystalkan peran Balai Bahasa Provinsi Papua dalam mendukung tercapainya sasaran strategis Kemendikbudristek sebagai upaya mengejawantahkan visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

## **1.1** Kondisi Umum

Pada periode 2020—2021, Balai Bahasa Provinsi Papua menetapkan enam sasaran kegiatan (SK), yakni: [SK 1] Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia, [SK 2] Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia, [SK 3] Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik, [SK 4] Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina, [SK 5] Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah, dan [SK 6] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

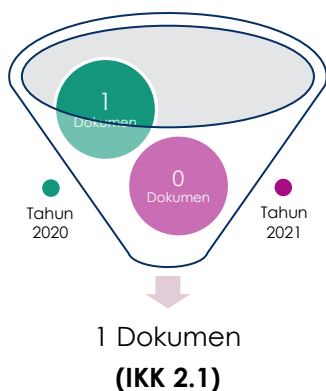


### [SK 1] Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia



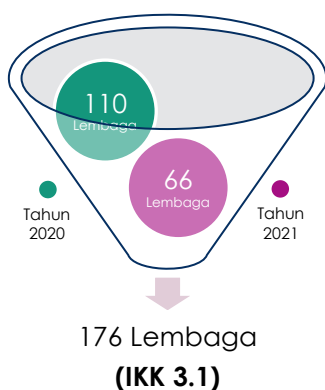
Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia dapat dilihat dari jumlah kosakata pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan jumlah kosakata/lema untuk kamus dwibahasa daerah ke bahasa Indonesia. Capaian realisasi sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan 1.1 Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia. Jumlah kosakata bahasa Indonesia yang telah dicapai Balai Bahasa Provinsi Papua pada tahun 2020 sebanyak 4.000 kosakata dan pada tahun 2021 sebanyak 1.000 kosakata.

### [SK 2] Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Balai Bahasa Provinsi Papua menyelenggarakan kegiatan Pelaksanaan Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah dengan menghasilkan keluaran Rekomendasi Bahan Kebijakan Bahasa dan Sastra di Daerah. Sasaran strategis ini capaian realisasinya diukur oleh 1 (satu) indikator kinerja, yakni IKK 2.1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian. Adapun capaian Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian yang dicapai Balai Bahasa Provinsi Papua tahun 2020 sebanyak 1 dokumen sedangkan pada tahun 2021 nomenklatur IKK ini sudah tidak ada sehingga pada tahun 2021 tidak ada capaian untuk IKK ini.

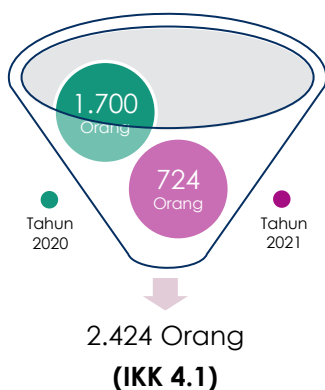
### [SK 3] Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik



Pengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik merupakan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021 Balai Bahasa Provinsi Papua melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung terwujudnya sasaran penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Capaian

realisasi sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan 3.1 Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina. Pada tahun 2020 capaian IKK ini sebanyak 110 lembaga dan pada tahun 2021 sebanyak 66 lembaga.

### [SK 4] Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina



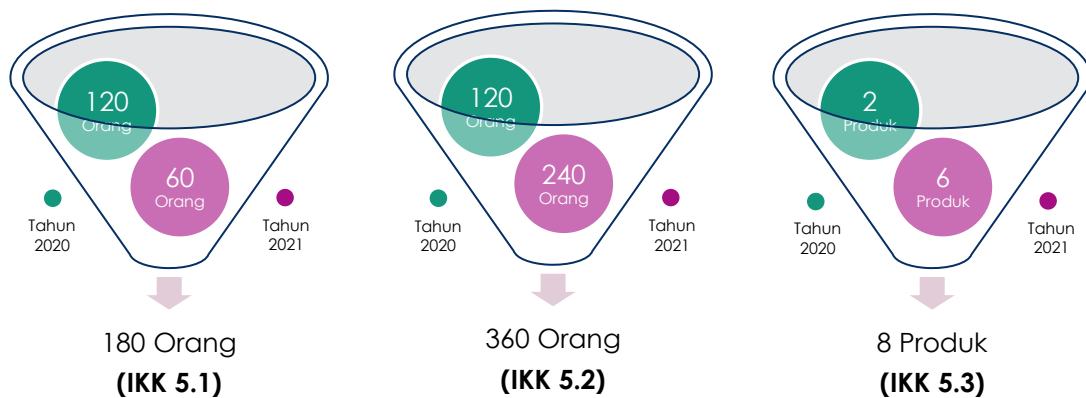
Peningkatan penutur bahasa terbina dilakukan sebagai bagian dari upaya pembinaan bahasa Indonesia. Sasaran utama pembinaan bahasa Indonesia adalah para tenaga profesional dan calon tenaga profesional baik di lingkup instansi pemerintah, swasta, maupun generasi muda. Capaian realisasi sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja

kegiatan 4.1 Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra. Pada tahun 2020 capaian Balai Bahasa Provinsi Papua sebanyak 1.700 orang dan pada tahun 2021 sebanyak 724 orang.



## [SK 5] Terlindungnya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah

Pelindungan bahasa dan sastra daerah yang terancam punah merupakan amanah dari PP Nomor 57 Tahun 2014, tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Target kegiatan pelindungan bahasa dan sastra ini adalah agar bahasa dan sastra yang berada dalam kondisi kritis dan terancam punah itu meningkat statusnya menjadi berstatus (minimal) mengalami kemunduran. Capaian realisasi sasaran kegiatan ini diukur melalui tiga indikator kinerja kegiatan, dengan perincian tingkat capaian sebagai berikut.



Indikator Kinerja Kegiatan, yakni IKK 5.1 Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah, IKK 5.2 Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah, dan IKK 5.3 Jumlah Produk Kesastraan Berkembang.

Adapun capaian Balai Bahasa Provinsi Papua untuk IKK 5.1 Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah pada tahun 2020 sebanyak 120 orang dan pada tahun 2021 sebanyak 60 orang. IKK 5.2 Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah capaian pada tahun 2020 sebanyak 120 orang dan pada tahun 2021 sebanyak 240 orang. Sementara itu, capaian IKK 5.3 Jumlah Produk Kesastraan Berkembang pada tahun 2020 sebanyak 2 produk dan pada tahun 2021 sebanyak 6 produk.

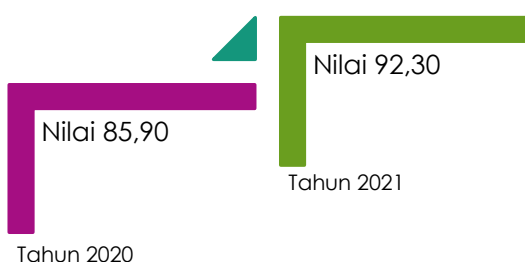




## [SK 6] Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



(IKK 6.1)



(IKK 6.2)

Tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat dilihat dari pemerolehan nilai SAKIP dan nilai kinerja masing-masing satuan kerja. Capaian realisasi sasaran kegiatan ini diukur melalui IKK 6.1 Predikat SAKIP Satker minimal BB dan IKK 6.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91.

Adapun capaian predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Papua pada tahun 2020 adalah C dan pada tahun 2022 adalah B. Sementara itu, capaian Nilai Kinerja

Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Papua tahun 2020 adalah nilai 85,90 dan tahun 2021 nilai 92,30.

### 1.2 Pokok-Pokok Perubahan dalam Renstra BBP Papua 2020—2024

Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Papua Tahun 2020—2024 direviu dan diselaraskan agar mampu menjawab tantangan perubahan. Hadirnya beberapa kebijakan mutakhir ditindaklanjuti dengan penyelarasan berbagai dokumen perencanaan, termasuk Renstra. Dalam dokumen ini, perubahan dilakukan terhadap beberapa hal berikut.

No.	Struktur (Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2019)	Renstra	
		Semula	Menjadi
1.	BAB I Pendahuluan		
	1.1 Kondisi Umum	Capaian Umum	Capaian 2020—2021
	1.3 Permasalahan dan Potensi	Permasalahan diurai berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, dan ancaman (analisis SWOT)	Pemutakhiran uraian kekuatan, kelemahan, potensi, dan ancaman sesuai kondisi saat ini

No.	Struktur (Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2019)	Renstra	
		Semula	Menjadi
2.	BAB II Visi, Misi, dan Tujuan		
		a. Mencantumkan visi Presiden yang diturunkan menjadi visi Kemendikbud	Mencantumkan visi Presiden yang diturunkan menjadi visi Kemendikbudristek, BPP Bahasa, dan Balai Bahasa Provinsi Papua
		b. Narasi misi serupa dengan visi	Penajaman dan penyelarasan misi, tujuan, dan sasaran
		c. Terdapat indikator keberhasilan visi	Dihapus
		d. Terdapat indikator keberhasilan tujuan strategi	Dihapus
		e. Terdapat tujuan kegiatan	Penyelarasan tujuan kegiatan dengan sasaran program BPP Bahasa
		f. Terdapat sasaran kegiatan	Penyelarasan sasaran kegiatan dengan tujuan kegiatan
		g. Tidak terdapat <i>cascading</i> antara SS, SP, dan SK	Memunculkan <i>cascading</i> antara SS, SP, dan SK
3.	BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan		
		1. Arah kebijakan BPP Bahasa disajikan secara umum	Arah kebijakan difokuskan pada tiga prioritas (literasi, perlindungan bahasa daerah, dan internasionalisasi bahasa Indonesia)
		2. Strategi pelaksanaan program disajikan secara umum	Strategi pelaksanaan program diuraikan berbasis Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP)
		3. Arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan BBPP disajikan secara umum	Arah kebijakan difokuskan pada mendukung tercapainya sasaran strategis BPP Bahasa dengan strategi pelaksanaan kegiatan berbasis KKLP



No.	Struktur (Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2019)	Renstra		
		Semula	Menjadi	
		4.	Kerangka regulasi belum mencakupi kebutuhan mutakhir	Penambahan beberapa usulan dalam kerangka regulasi, termasuk tentang <b>Widyabasa</b>
		5.	Kerangka kelembagaan digambarkan secara umum	Kerangka kelembagaan dibuat lebih spesifik berdasarkan kriteria tertentu, misal jabatan atau pangkat golongan
4.	BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Kelembagaan			
			Sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan Permendikbud No. 22 Tahun 2020	Sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan Permendikbud No. 13 Tahun 2022  Sasaran dan indikator dipertajam dengan mengacu pada tiga prioritas utama BPP Bahasa (literasi, perlindungan bahasa daerah, dan internasionalisasi bahasa Indonesia)
5.	BAB V Penutup			
			-	Perubahan redaksional
6.	Lampiran			
			Definisi operasional	1. Definisi operasional 2. Matriks a. <i>Cascading</i> b. Matriks Semula-Menjadi sasaran dan indikator

### 1.3 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan analisis terhadap berbagai faktor internal dan eksternal yang ada di Balai Bahasa Provinsi Papua, teridentifikasi sebanyak 32 faktor yang tersebar pada empat kluster, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Berikut ini adalah keseluruhan faktor tersebut.



### KEKUATAN (strength)

- Tersedianya dukungan regulasi (landasan hukum) kebahasaan dan kesastraan yang lengkap;
- Satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas dalam pengelolaan bahasa dan sastra di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan;
- Tersedianya produk kodifikasi (kamus dwibahasa) sebagai penunjang bahan literasi berbahasa Indonesia yang terintegrasi dengan TIK;
- SDM memenuhi kualifikasi untuk memberikan layanan kebahasaan kepada lembaga/masyarakat;
- Tersedianya tenaga penerjemah yang ada di BBP Papua; dan
- Ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan, pembinaan, dan perlindungan kebahasaan dan kesastraan yang memadai.



### ANCAMAN (threats)

- Stabilitas politik dan ekonomi serta pertahanan dan keamanan yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- Dominasi bahasa asing yang berimplikasi terhadap pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- Adanya literacy loss pada anak usia PAUD dan SD karena pandemi covid-19 pada tahun 2020—2022;
- Adanya ancaman peretas yang akan meretas laman, aplikasi, maupun platform digital milik BBP Papua;
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk kodifikasi;
- Pemahaman masyarakat tentang amanah penginternasionalan bahasa Indonesia belum sepenuhnya dipahami
- Koneksi jejaring internet yang tidak stabil di sebagian wilayah uji di Papua; dan
- Pemerintah daerah tidak menjadikan program perlindungan bahasa dan sastra daerah sebagai prioritas.



### KELEMAHAN (weaknesses)

- Regulasi kebahasaan dan kesastraan yang sudah ada belum sepenuhnya terimplementasi;
- Jumlah SDM yang sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan lembaga/masyarakat terhadap layanan kebahasaan dan kesastraan (antara lain karena adanya SDM Peneliti yang beralih ke BRIN);
- Masih banyak tenaga teknis yang masih berpendidikan S-1;
- Masih kurangnya tenaga teknis yang menjadi ahli bahasa, seperti linguist forensik, penyunting, dan ahli bahasa perundang-undangan;
- Minimnya jumlah tenaga administrasi yang ada di Balai Bahasa Provinsi Papua;
- Standar Kompetensi Lulusan BIPA belum terimplementasi secara penuh
- Kurang lengkapnya data bahasa dan sastra daerah yang ada di Tanah Papua (pendataan masih belum berjalan dengan baik);
- Belum adanya evaluasi keberhasilan program perlindungan bahasa daerah;
- SOP yang belum diimplementasikan dengan maksimal; dan
- Belum memiliki tanah sendiri sehingga bangunan balai masih menumpang di tanah milik pemda.



### PELUANG (opportunities)

- Luasnya wilayah kerja Balai Bahasa Provinsi Papua yang terdiri dari lima provinsi;
- Jumlah bahasa di lima provinsi yang ada di Papua mencapai 428;
- Telah disusunnya Raperdas tentang Pelindungan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah di Papua;
- Adanya kemajuan teknologi informasi yang pesat memungkinkan BBP Papua dapat mensosialisasikan dan menyebarluaskan produk kebahasaan dan kesastraan melalui media digital, internet, dan lainnya;
- Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap informasi kebahasaan dan kesastraan Balai Bahasa Provinsi Papua;
- Banyak komunitas literasi di Papua yang dapat diberdayakan guna meningkatkan budaya literasi masyarakat;
- Adanya keterlibatan generasi muda yang terseleksi sebagai Duta Bahasa, dalam mendukung pembinaan bahasa dan sastra; dan
- Layanan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia terbuka untuk semua kalangan.

Berdasarkan hasil evaluasi faktor internal dan faktor eksternal dari setiap faktor pada analisis SWOT di atas. Ditetapkan masalah dan potensi prioritas yang harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan program di Balai Bahasa Provinsi Papua sebagai berikut.

### **Masalah**

1. Adanya *literacy loss* pada anak usia PAUD dan SD karena pandemi covid-19 pada tahun 2020—2022.
2. Regulasi tentang kebahasaan dan kesastraan di Indonesia yang cukup lengkap. Namun, dalam realitasnya, regulasi kebahasaan dan kesastraan yang sudah ada tersebut belum sepenuhnya terimplementasi khususnya di wilayah Papua.
3. Masih kurangnya SDM tenaga teknis yang menjadi ahli bahasa, seperti ahli forensik, penyunting, dan ahli bahasa perundang-undangan.
4. Luasnya wilayah kerja Balai Bahasa Provinsi Papua berdampak pada layanan kebahasaan yang diberikan belum dapat menjangkau seluruh wilayah yang ada di Papua.
5. Jumlah bahasa daerah yang ada di Papua mencapai 428, tetapi pemerintah daerah sebagai pelaku utama dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah belum sepenuhnya menjadikan program perlindungan bahasa dan sastra daerah sebagai prioritas utama.
6. Dalam konteks internasionalisasi bahasa Indonesia, Standar Kompetensi Lulusan BIPA belum terimplementasi secara penuh.

### **Strategi**

1. Memberdayakan komunitas literasi yang ada di Papua untuk mendukung Gerakan Literasi Nasional.



2. Penguatan implementasi regulasi kebahasaan dan kesastraan di Indonesia dalam rangka pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.
3. Optimalisasi kualitas SDM tenaga teknis yang ada di Balai Bahasa Provinsi Papua melalui berbagai macam pelatihan.
4. Penguatan digitalisasi layanan kebahasaan dan kesastraan sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah yang ada di Papua.
5. Mendorong pemerintah daerah untuk dapat menerbitkan peraturan daerah terkait perlindungan bahasa dan sastra daerah.
6. Strategi internasionalisasi bahasa Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan baru yang lebih agresif.



## BAB II

# TUJUAN DAN SASARAN



## 2.1 Visi

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sejalan dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Papua mendukung visi Kemendikbudristek tahun 2020—2024 melalui bahasa dan sastra. Visi tersebut dirumuskan sebagai berikut.

---

*“Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif dengan bahasa dan sastra.”*

---

Dari rumusan visi di atas, Indonesia maju terwujud ketika bangsa Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong royong. Hal itu diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan untuk *membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.*

## 2.2 Misi

Untuk mencapai visi dan misi Kemendikbudristek dalam *Mewujudkan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Pengembangan Bahasa dan Sastra*, Balai Bahasa Provinsi Papua memiliki misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam Pendidikan,
2. Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional,
3. Mewujudkan kelestarian bahasa daerah,





4. Mengoptimalkan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

### 2.3 Tujuan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diturunkan dari visi dan misi presiden, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berfokus pada tujuan Kemendikbudristek, terutama dalam hal **pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan.**

Berdasarkan tujuan Kemendikbudristek tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan tujuan

1. Peningkatan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam pendidikan;
2. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional;
3. Peningkatan kelestarian bahasa daerah;
4. Penguatan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

### 2.4 Sasaran Strategis

Tujuan strategis yang telah ditetapkan dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra pada tahun 2024, yaitu

1. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan; dan
2. Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.



Sasaran strategis tersebut memiliki indikator keberhasilan yang disajikan dalam tabel berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia
	Indeks Pembangunan Kebudayaan
Menguatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek
	Predikat SAKIP Kemendikbudristek
	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

## 2.5 Sasaran Program

Dalam upaya mencapai sasaran strategis, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan empat sasaran program tahun 2021—2024. Secara terperinci sasaran program beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya
	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya
Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia
Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya



Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Pedikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi birokrasi Kemendikbudristek	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

## 2.6 Tujuan Kegiatan

Balai Bahasa Provinsi Papua merupakan unit pelaksana teknis Kemendikbud di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Maka tujuan kegiatan Balai Bahasa Provinsi Papua berasal dari sasaran program (SP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Dalam Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terdapat 5 Sasaran Program, yaitu:

(SP 1)	(SP 2)	(SP 3)	(SP 4)	(SP 5)
Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	Meningkatnya peran bahasa indonesia di kancah internasional	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi birokrasi Kemendikbudristek

Dari 5 Sasaran Program tersebut, Balai Bahasa Provinsi Papua menetapkan Sasaran Program 1, 2, 3, dan 4 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai Tujuan Kegiatan Balai Bahasa Provinsi Papua.



Tujuan kegiatan harus dapat diukur ketercapaiannya di akhir periode sehingga perlu ditentukan indikator kinerja tujuannya di akhir periode rencana strategis. Indikator Kinerja Tujuan telah ditentukan dalam renstra Kemendikbudristek dan Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sebagai kontribusi Balai Bahasa Provinsi Papua dalam perannya mendukung unit eselon I mencapai sasaran programnya, maka Indikator Kinerja Tujuan Balai Bahasa Provinsi Papua ditentukan seperti tabel berikut.

Tujuan Kegiatan BBPP	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target 2024
Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	Persentase penutur bahasa indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	Persen	72
	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	Persen	91,99
Meningkatnya peran bahasa indonesia di kancah internasional	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa indonesia	Negara	50
Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	Indeks	20,54
Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Pedikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A

## 2.7 Sasaran Kegiatan

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan kegiatan Balai Bahasa Provinsi Papua, maka diperlukan sasaran kegiatan yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada akhir periode renstra. Penetapan sasaran kegiatan mempunyai peran penting dalam mengukur ketercapaian tujuan kegiatan.

Sebagai unit kerja yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Papua sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menetapkan 7 (tujuh) sasaran kegiatan dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut.



Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	
1	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	1.1	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	2.1	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan
3	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	3.1	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya
		3.2	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina
4	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	4.1	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)
5	Tersedianya produk diplomasi bahasa	5.1	Jumlah produk penerjemahan
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra	6.1	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah
7	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	7.1	Predikat SAKIP Balai Bahasa Papua
		7.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Papua

Berdasarkan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang selaras dengan perubahan rencana strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Papua menargetkan capaian 2022—2024, terlihat dari tabel berikut.



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Tahun		
					2022	2023	2024
1	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	1.1	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	2	2	2
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	2.1	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	Orang	358	700	723
3	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	3.1	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	Lembaga	45	45	45
		3.2	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	Lembaga	15	15	15
4	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	4.1	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	Orang	25	25	25
5	Tersedianya produk diplomasi bahasa	5.1	Jumlah produk penerjemahan	Produk	2	12	12
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	6.1	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	Orang	22	274	274
7	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Papua	7.1	Predikat SAKIP Balai Bahasa Papua	Predikat	BB	BB	BB
		7.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Papua	Skor	91	91	91



Berikut *cascading* antara Sasaran Strategis, Sasaran Program/Tujuan Kegiatan, dan Sasaran Kegiatan.

Sasaran Strategis	Sasaran Program/ Tujuan Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan
		Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan
	Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA
		Tersedianya produk diplomasi bahasa
	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra
Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	



## BAB III

# ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN





## 3.1 Arah Kebijakan

### 3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2020—2024 diselenggarakan melalui tujuh agenda pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024. Ketujuh agenda pembangunan tersebut ialah

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari tujuh agenda pembangunan di atas, Kemendikudristek berkontribusi secara langsung dalam mendukung agenda 3, 4, dan 7. Ketiga agenda tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek sebagaimana tertuang dalam Permendikbudristek No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024.

Sementara itu, dari tiga agenda pembangunan yang didukung oleh Kemendikbudristek, terdapat dua agenda yang disokong oleh unit kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu agenda 4 dan 7. Keduanya diuraikan sebagai berikut.



*Agenda Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*

Revolusi mental merupakan gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: *Bhinneka Tunggal Ika*. Untuk mendukung hal tersebut, telah ditetapkan beberapa program prioritas dan kegiatan prioritas. Salah satu program dan kegiatan tersebut ialah peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas yang salah satu kegiatan utamanya berkaitan erat dengan program kebahasaan.

No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis
A	Peningkatan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas	
1.	Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan

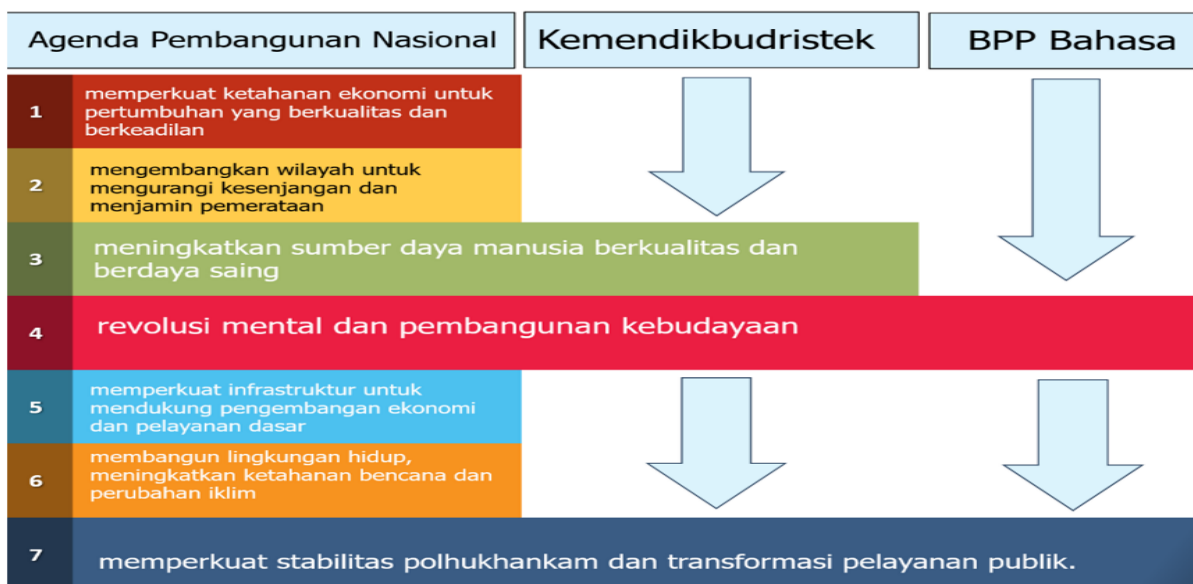
*Agenda Pembangunan 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*

Untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian diperlukan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi melalui penerapan sistem merit yang sangat baik, penguatan kelembagaan melalui optimalisasi proses bisnis dan reformasi sistem akuntabilitas kinerja, serta transformasi pelayanan publik yang diwujudkan melalui strategi berikut.



No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis
A	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	
1.	Penguatan manajemen aparatur sipil negara	SS 5 Menguatnya tata Kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
2.	Penataan kelembagaan dan proses bisnis	
3.	Reformasi sistem akuntabilitas kinerja	
4.	Transformasi pelayanan publik	

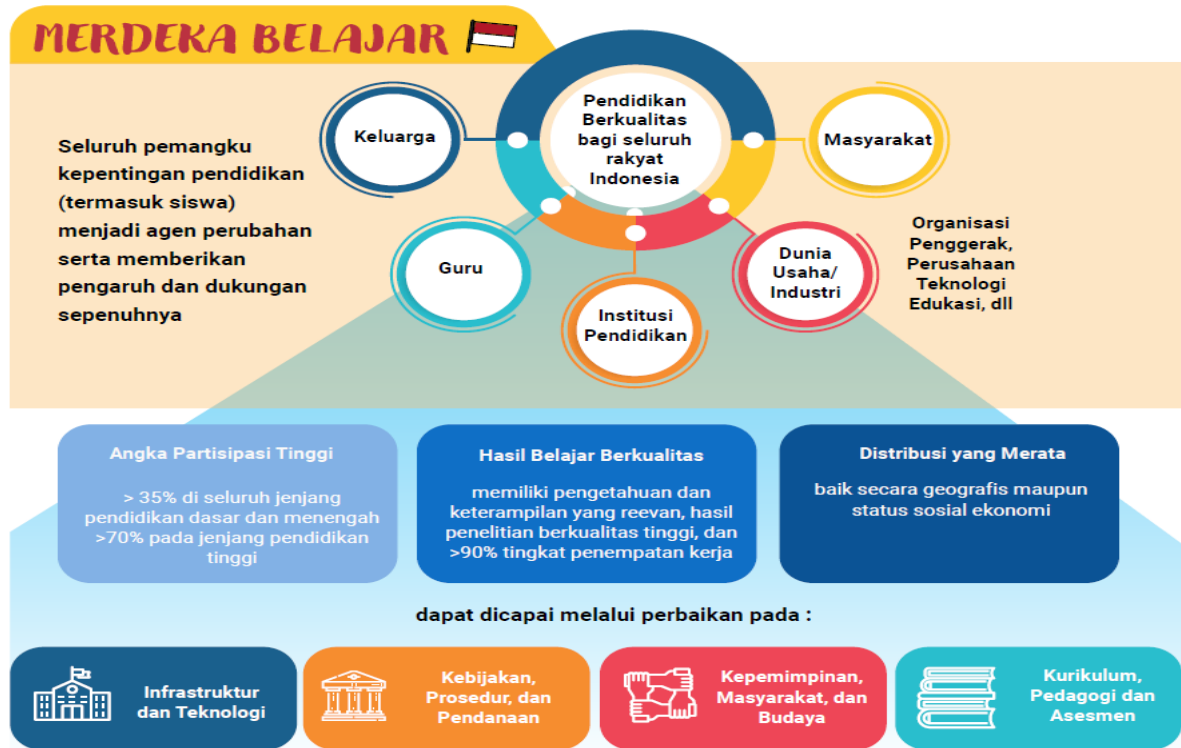
Secara umum, kontribusi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek dalam menopang agenda pembangunan ditampilkan dalam gambar berikut ini.



### 3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyusun arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang selaras. Secara garis besar, Kemendikbudristek mengusung platform **Merdeka Belajar** sebagai cara untuk mencapai hal tersebut. Merdeka belajar menjadi semangat yang menjiwai keseluruhan arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.





Selanjutnya, dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN, Kemendikbudristek mengarahkan fokus kebijakan pada lima hal sebagai berikut.

1. Optimalisasi angka partisipasi pendidikan
2. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan
3. Pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
4. Kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan
5. Tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Berkaitan dengan hal di atas, pada butir pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, berikut ini kondisi yang ingin dicapai oleh Kemendikbudristek.

1. Pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam pendidikan.
2. Penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional.
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

Strategi yang dikembangkan secara khusus untuk mencapai kondisi yang diinginkan oleh Kemendikbudristek terurai dalam table berikut ini.

No.	Arah Kebijakan/Kondisi yang Ingin Dicapai/Strategi
<b>Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan</b>	
1.	Pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam Pendidikan
a.	meningkatkan nalar kritis pendidik dan peserta didik melalui bahasa sebagai implementasi merdeka belajar;
b.	meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan melalui pendekatan tematik terpadu;
c.	Meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai media pengembangan literasi dalam pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran;
d.	mengoptimalkan peran bahasa sebagai wahana Pendidikan karakter;
e.	mengoptimalkan peran bahasa sebagai sarana pembentuk jati diri dan pikiran keindonesiaan pendidik dan peserta didik;
f.	meningkatkan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas awal
g.	memajukan budaya melalui wahana pendidikan di berbagai jenjang dan berbagai ranah.
2.	Penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional
a.	menerapkan standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur jati dan penutur asing bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan dan konteks penggunaan bahasa Indonesia di Indonesia;
b.	meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan Republik Indonesia dalam pengembangan program Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing sebagai salah satu instrumen utama diplomasi lunak Indonesia



No.	Arah Kebijakan/Kondisi yang Ingin Dicapai/Strategi
	c. meningkatkan partisipasi publik (diaspora Indonesia, pelajar Indonesia, sahabat Indonesia (friends of Indonesia), dan Indonesianis) serta pemangku kepentingan dalam pengembangan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di luar negeri.
3	Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan
	a. memfasilitasi adanya ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
	b. melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
	c. Mengembangkan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia
	d. Mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
	e. memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem;
	f. reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan
	g. meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan
	h. meningkatkan peran aktif komunitas dan pemerintah daerah dalam program revitalisasi bahasa dan sastra daerah
	i. mengembangkan model konservasi dan revitalisasi untuk mencegah kepunahan bahasa dan sastra daerah
	j. mendokumentasikan bahasa dan sastra daerah untuk perlindungan bahasa dan sastra daerah



### 3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dengan mengacu pada arah kebijakan nasional yang diturunkan ke dalam arah kebijakan Kemendikbudristek, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut.

#### 3.1.3.1 Arah Kebijakan BPP Bahasa

Pembangunan bidang kebahasaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan strategi Kemendikbudristek, terutama dalam mewujudkan *pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan*. Arah kebijakan ditujukan pada tiga fokus utama, yaitu

1. penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan,
2. pelindungan bahasa dan sastra daerah, dan
3. internasionalisasi bahasa Indonesia.



**Fokus kebijakan pertama** ialah *penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan*. Literasi kebahasaan dan kesastraan merupakan salah satu upaya BPP Bahasa menciptakan ekosistem masyarakat Indonesia yang berbudaya literasi (terutama baca-tulis). Literasi secara operasional dapat dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, baik teks maupun nonteks, yang dilakukan secara kritis untuk meningkatkan kecakapan hidup sumber daya manusia.

Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan diarahkan pada dua ranah, yaitu dunia pendidikan dan masyarakat umum. Penguatan literasi dalam dunia pendidikan bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan nalar kritis siswa, sedangkan penguatan literasi masyarakat umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang literat.

Dalam implementasinya, penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan mencakup penyusunan bahan pengayaan literasi, pembinaan bahasa dan sastra, serta pengujian bahasa. Dalam hal penyusunan untuk penyediaan bahan pengayaan literasi, terdapat beraneka produk kebahasaan dan kesastraan yang dihasilkan oleh BPP Bahasa dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, misalnya kamus, tesaurus, tata bahasa, buku bacaan literasi, dan bahan pembinaan bahasa. Sementara itu, dalam hal pembinaan masyarakat, terdapat berbagai aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas berbahasa masyarakat, misalnya pembinaan penutur bahasa, pembinaan lembaga (termasuk komunitas), layanan ahli bahasa, serta dan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia.

## Literasi Kebahasaan dan Kesastraan

### Penyusunan

1. Produk kodifikasi seperti kamus, tata bahasa, ejaan, dan ensiklopedia
2. Bahan pengayaan pendukung literasi
3. Instrumen kemahiran berbahasa Indonesia
4. Bahan Pembinaan bahasa dan sastra

### Pembinaan

1. Penutur bahasa terbina (kalangan profesional dan generasi muda)
2. Lembaga terbina (lembaga terfasilitasi dan komunitas penggerak literasi)

### Pengujian

Penutur bahasa teruji dengan UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia)



**Fokus kebijakan kedua** ialah *pelindungan bahasa dan sastra daerah*. Pelindungan bahasa dan sastra daerah merupakan upaya menjaga bahasa dan sastra daerah agar tidak punah. Hal itu dilandasi pemahaman bahwa ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga—sejumlah besar pengetahuan—termasuk kearifan lokal, legenda, dan puisi—yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. Berkaitan dengan hal itu, berbagai aktivitas dilaksanakan dalam rangka melindungi bahasa daerah, yaitu pemetaan bahasa, kajian daya hidup bahasa, konservasi, revitalisasi, dan registrasi.

Dari berbagai aktivitas pelindungan bahasa daerah, prioritas dalam Renstra periode ini diarahkan pada upaya menumbuhkan penutur muda melalui revitalisasi bahasa daerah. Revitalisasi merupakan langkah strategis dalam rangka menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan sehari-hari melalui cara yang menyenangkan. Revitalisasi juga merupakan upaya menjamin hak masyarakat adat untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa mereka serta mengarusutamakan keragaman bahasa ke dalam semua agenda pembangunan.

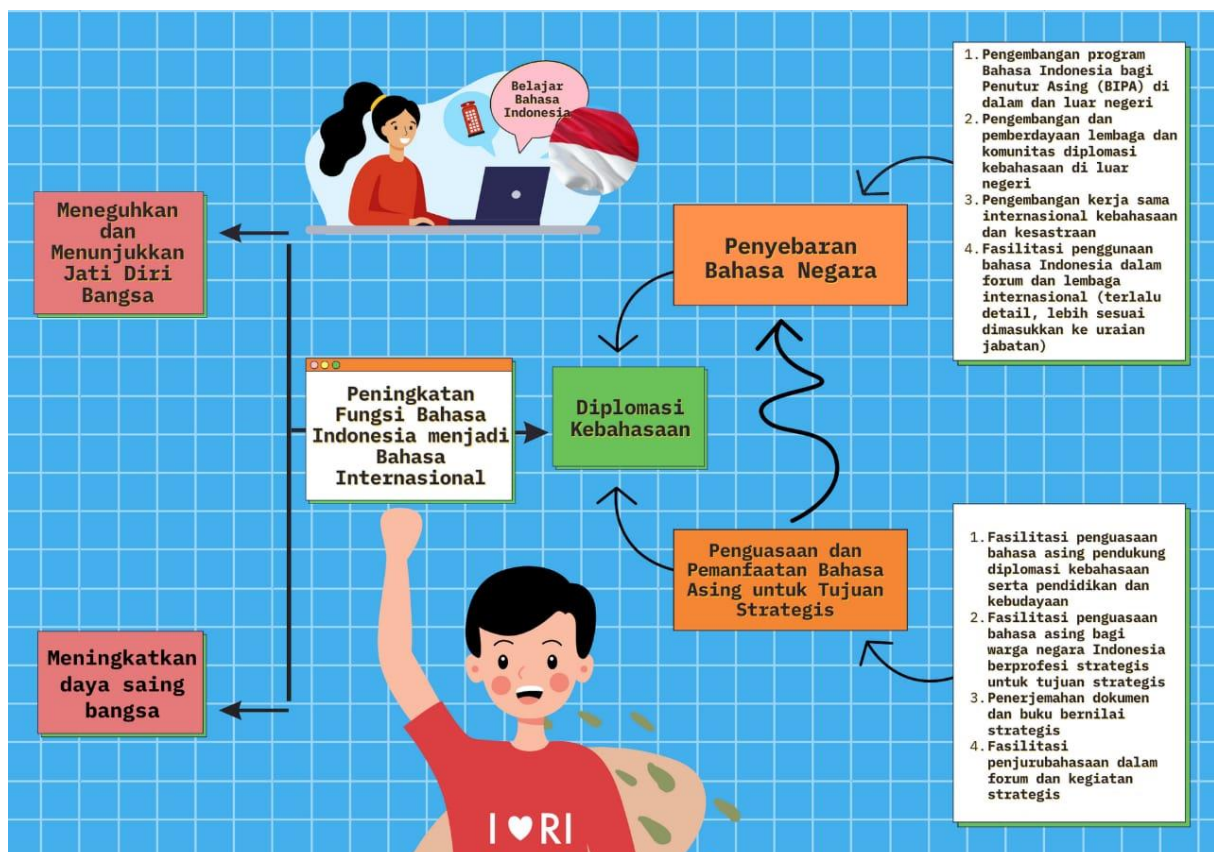
Strategi baru yang ditempuh dalam rangka revitalisasi bahasa daerah diuraikan dalam Merdeka Belajar Episode 17 yang diluncurkan oleh Mendikbudristek pada 22 Februari 2022. Strategi baru ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, MGMP, KKG, pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, pegiat, maestro, media massa, duta bahasa, dan keluarga. Dalam implementasinya, revitalisasi bahasa dilaksanakan berdasarkan model yang sesuai dengan situasi kebahasaan di wilayah tertentu.

**Fokus kebijakan ketiga** berkaitan dengan *internasionalisasi bahasa Indonesia*. Internasionalisasi bahasa Indonesia merupakan upaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Untuk mewujudkan bahasa



Indonesia sebagai bahasa internasional, strategi Lingua Franca Plus ditempuh melalui peningkatan penyebaran bahasa Indonesia di berbagai ranah penggunaan dengan menggunakan pendekatan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, ekonomi, investasi, politik, diplomasi, pertahanan dan keamanan. Melalui pendekatan pendidikan, Badan Bahasa melaksanakan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan penerjemahan

Program BIPA merupakan salah satu upaya diplomasi kebahasaan yang dilakukan dengan menyebarkan bahasa negara melalui jalur pendidikan. Dalam pengembangan program BIPA, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki peran dalam penyusunan regulasi, serta pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi secara kelembagaan kepada penerima manfaat dan pemangku kepentingan. Sasaran akhir fasilitasi kelembagaan itu adalah pemelajar BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri. Fasilitasi BIPA di luar negeri secara langsung juga berdampak pada negara yang Lembaga di dalamnya mengajarkan Bahasa Indonesia.



Program lain yang menjadi bagian dari upaya internasionalisasi bahasa Indonesia adalah program penerjemahan dan penjurubahasaan. Untuk mendukung upaya tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan program penerjemahan buku dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Penerjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia dilaksanakan untuk mendukung pembelajaran BIPA. Sementara itu, penerjemahan buku dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dilakukan untuk menyebarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ke masyarakat global. Untuk merealisasikan program tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, baik di Badan Bahasa secara khusus maupun di masyarakat. Dalam konteks ini, Badan Bahasa telah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menerbitkan lima Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi penerjemah dan juru bahasa.

### 3.1.3.2 Strategi Pelaksanaan Program

Untuk melaksanakan program bidang kebahasaan dan kesastraan, BPP Bahasa menetapkan strategi pelaksanaan program melalui platform **Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP)**. Platform ini merupakan upaya fungsionalisasi para tenaga fungsional di lingkungan BPP Bahasa, baik satker pusat maupun satker UPT, agar dapat bekerja secara optimal sesuai dengan minat dan kepakarannya dalam suatu bidang keahlian dan layanan profesional kebahasaan dan kesastraan tertentu.

Pola kerja KKLP bersifat fungsional, lintas struktur, dan holistik-integratif dengan penjelasan sebagai berikut.

#### a. Fungsional

Melalui prinsip ini, KKLP bekerja menurut kepakaran fungsional keilmuan para anggotanya yang dikelompokkan menurut hasil pemetaan jenis-jenis kepakaran guna mengukuhkan kepakaran individu dan kelompok serta mengoptimalkan layanan yang dapat diberikan oleh anggota KKLP kepada mitra kerjanya.



b. Lintas Struktur (Pusat-UPT)

Dengan prinsip ini, KKLP dibentuk berdasarkan kepakaran anggotanya yang dapat tersebar di satuan-satuan kerja yang ada di lingkungan BPP Bahasa. Melalui KKLP, pegawai fungsional di satuan kerja pusat dan UPT akan dikumpulkan di dalam kelompok kepakaran tertentu guna memberikan layanan profesional yang optimal.

c. Holistik-Integratif

Melalui prinsi ini, KKLP menyelenggarakan tugas dan fungsi pengembangan kepakaran dan layanan dalam 'satu atap-satu rangkaian' mulai dari kegiatan (1) analisis-sintesis substansi kebahasaan dan kesastraan, (2) pelatihan untuk peningkatan kapasitas anggota, (3) diseminasi, publikasi, sampai dengan penyediaan layanan profesional yang dapat diberikan kepada mitra kerjanya.

Berdasarkan jenis kepakaran yang ada di BPP Bahasa, terdapat tujuh kelompok kepakaran dan layanan profesional, yaitu (1) KKLP Perkamusan dan Peristilahan, (2) KKLP Pelindungan dan Pemoderna, (3) KKLP Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), (4) KKLP Literasi, (5) KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum, (6) KKLP Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), dan (7) KKLP Penerjemahan.

### Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional



01 Analisis-Sintesis



02 Peningkatan Kompetensi



03 Diseminasi

Seminar, Lokakarya, Bimtek, dsb.



04 Publikasi

Jurnal ilmiah, media massa, dan/atau media sosial.



05 Layanan Profesional

Layanan kepada institusi pemerintah atau swasta, organisasi profesi, masyarakat umum atau perorangan.



Selanjutnya, dengan mengacu pada tiga agenda utama BPP Bahasa, KKLP bekerja di bawah koordinasi satuan kerja pusat dengan pembagian tugas sebagai berikut.

No.	Bidang	KKLP		Pengampu
1.	Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	a.	Perkamusan dan Peristilahan	Pusbanglin
		b.	Literasi	Pusbin
		c.	Pembinaan dan Bahasa Hukum	Pusbin
		d.	Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)	Pusbin
2.	Pelindungan Bahasa Daerah	a.	Pelindungan dan Pemodernan	Pusbanglin
3.	Internasionalisasi Bahasa Indonesia	a.	Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Pustanda
		b.	Penerjemahan	Pustanda

No.	Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kemendikbudristek	Arah Kebijakan BPP Bahasa	Strategi	Pelaksana
1.	Peningkatan budaya literasi	Pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam pendidikan;	Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan	Meningkatkan kualitas program kebahasaan dan kesastraan melalui Kelompok	1. KKLP Perkamusan dan Peristilahan 2. KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum 3. KKLP Literasi 4. KKLP Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia
2.	Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	Penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancan nasional dan internasional;	Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional	Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP)	1. KKLP BIPA 2. KKLP Penerjemahan
		Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan.	Pelindungan bahasa daerah		KKLP Pelindungan dan Pemodernan



### 3.1.3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berdasarkan fokus kebijakan dan strategi pelaksanaan program, terdapat prioritas kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan pendanaan yang memadai. Beberapa prioritas tersebut ditampilkan dalam gambar di bawah ini.



Pada **fokus kebijakan pertama (literasi kebahasaan dan kesastraan)**, terdapat prioritas yang dikerjakan tiap tahun. Pada tahun 2022, BPP Bahasa mencetak dan mengirimkan buku pengayaan sebanyak 12.887.162 eksemplar yang didistribusikan ke 13.572 sasaran (PAUD dan SD) di wilayah 3T. Pencetakan dan pengiriman buku pengayaan dilanjutkan dengan pendampingan pemanfaatan buku. Kegiatan-kegiatan tersebut didanai melalui Pagu Alokasi Anggaran TA 2022 dan tambahan anggaran dari BA BUN. Pada tahun 2022 juga diluncurkan aplikasi-aplikasi kebahasaan yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, seperti superaplikasi Halo Bahasa dan Sipebi (aplikasi penyuntingan bahasa Indonesia). Selain itu, dilaksanakan pula pengujian kemahiran berbahasa Indonesia kepada siswa, guru, dan para pemangku kepentingan dengan menggunakan UKBI Adaptif Merdeka.

Dalam rangka mendukung penguatan literasi, pada tahun 2023 terdapat agenda prioritas berupa pemberian **bantuan pemerintah untuk komunitas kebahasaan dan kesastraan**, termasuk komunitas literasi. Komunitas-komunitas tersebut merupakan wahana berkarya bagi para pegiat bahasa dan sastra. Dari komunitas tersebut lahir para penulis-penulis yang mampu menginspirasi generasi muda agar mampu berkarya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, keberadaan komunitas sastra bervariasi. Sebagian di antaranya sangat potensial dan prospektif dalam menggembleng bibit-bibit penulis muda. Untuk komunitas yang berpotensi menjadi wahana kreatif itulah, pemerintah perlu mengulurkan tangan agar bakat-bakat yang ada tidak hilang karena kurangnya sarana, prasarana, maupun kegiatan. Peran pemerintah dalam rangka memberdayakan komunitas-komunitas seperti ini sangat diharapkan sehingga komunitas dapat menjadi mitra strategis dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat.

Pada tahun 2023 juga terdapat agenda penting, yaitu **Kongres Bahasa Indonesia XII**. Kongres Bahasa Indonesia (KBI) merupakan forum akbar kebahasaan yang dilaksanakan secara rutin setiap lima tahun. Kongres pertama dilaksanakan di Surakarta pada tahun 1938, sedangkan kongres terakhir dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2018. Dalam forum ini dibahas perkembangan mutakhir ilmu kebahasaan dan kesastraan. Dari forum ini dihasilkan rekomendasi yang menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dan para pemangku kepentingan kebahasaan dan kesastraan.



Sementara itu, penguatan literasi pada tahun 2024 diarahkan pada optimalisasi layanan kebahasaan, terutama pemantapan produk kodifikasi bahasa, pembinaan intensif terhadap lembaga pengguna bahasa, peluasan



pengguna UKBI Adaptif Merdeka, dan pendampingan SD dan PAUD dalam pemanfaatan buku bacaan.

Pada **fokus kebijakan kedua (pelindungan bahasa daerah)**, tahun 2022 hingga 2024 dimanfaatkan untuk menindaklanjuti peluncuran Merdeka Belajar Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah. Implementasi model pelindungan bahasa dan sastra daerah diperluas wilayahnya, dari 12 provinsi (tahun 2022) menjadi 20 provinsi (tahun 2023) dan 34 provinsi (tahun 2024). Pada akhir periode Renstra, diharapkan revitalisasi bahasa daerah menjadi sebuah gerakan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Pada tahun 2023, terdapat agenda peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional (*International Mother Language Day*). Hari Bahasa Ibu Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 Februari setiap tahun. Peringatan itu menandai kepedulian warga dunia terhadap keberadaan bahasa daerah yang kian lama kian mengkhawatirkan. Bahkan, secara khusus PBB menetapkan tahun 2022—2032 sebagai Dekade Internasional Bahasa Daerah untuk menggerakkan semua pemangku kepentingan agar bersama-sama melestarikan bahasa daerah. Dalam kaitannya dengan hal itu, pada tahun 2023 Indonesia bersama dengan UNESCO akan menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Kegiatan diselenggarakan di tingkat nasional dan internasional. Puncak peringatan diagendakan di markas UNESCO di Paris, Prancis dengan menampilkan Mendikbudristek sebagai pembicara kunci pada forum tersebut.

Sementara itu, pada **fokus kebijakan ketiga (internasionalisasi bahasa Indonesia)**, terdapat agenda prioritas berupa **penyusunan peta jalan penginternasionalan bahasa Indonesia**. Selanjutnya, program dan kegiatan tiap tahun dilaksanakan berdasarkan peta jalan tersebut untuk memperkuat diplomasi kebahasaan yang selama ini telah dijalankan melalui fasilitasi Lembaga penyelenggara BIPA dan penerjemahan lintasbahasa.





Dalam hal dukungan manajemen, terdapat agenda prioritas yang perlu disokong penuh, yaitu (1) Penyediaan gedung/kantor bagi UPT, (2) Penyelesaian regulasi tentang jabatan fungsional Widyabasa, (3) Peningkatan kompetensi pegawai, dan (4) Penyusunan indeks pembangunan bidang kebahasaan, dan (5) Evaluasi program 2020—2024 (termasuk evaluasi KBI).

Berkaitan dengan penyediaan gedung/kantor bagi UPT (balai/kantor bahasa), prioritas pertama ditujukan pada UPT yang telah memperoleh izin prinsip dari Presiden untuk membuka blokir moratorium pembangunan gedung/kantor. Dukungan pendanaan bagi UPT-UPT tersebut perlu diprioritaskan pada tahun 2023. Bagi UPT lain, upaya penyediaan tanah/gedung/kantor dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan data, baik izin prinsip maupun RKBMN. Pada akhir periode Renstra, diharapkan semua UPT telah menempati gedung/kantor yang layak karena UPT tersebut merupakan garda terdepan dalam hal pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa di masyarakat. Satuan-satuan kerja tersebut mengemban berbagai amanat regulasi. Luas wilayah kerja tiap UPT juga sangat luas (satu sampai dua provinsi). Unit-unit tersebut merupakan wajah BPP Bahasa (Kemendikbudristek) di daerah sehingga keberadaannya perlu diperhatikan. Dengan fasilitas yang memadai, UPT tersebut dapat lebih optimal dalam melayani masyarakat dan lebih bermartabat sebagai representasi Kemendikbudristek.

Berkaitan dengan jabatan fungsional Widyabasa, perlu ditempuh langkah ekstra untuk menyelesaikan semua regulasi yang diperlukan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menginisiasi kemunculan jabatan fungsional Widyabasa sebagai salah satu strategi dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme SDM yang memiliki kepakaran di bidang kebahasaan dan kesastraan. Inisiasi tentang jabatan fungsional Widyabasa merupakan langkah strategis untuk mengisi rumpang nama kepakaran di bidang kebahasaan dan kesastraan yang dari segi pelaksanaan tugas dan kepakarannya sebenarnya telah lama diemban oleh



pegawai di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Melalui penetapan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjadi unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengelola jabatan fungsional Widyabasa. Secara khusus jabatan fungsional Widyabasa mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra. Jabatan ini merupakan jabatan fungsional kategori keahlian yang meliputi Widyabasa Ahli Pertama, Widyabasa Ahli Muda, Widyabasa Ahli Madya, dan Widyabasa Ahli Utama.

Berkaitan dengan peningkatan kompetensi pegawai, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan organisasi atas kompetensi yang harus dimiliki para pegawai. Selanjutnya, pengembangan kompetensi didasarkan pada peta



kompetensi yang disusun tersebut. Pengembangan kompetensi ditujukan bagi pegawai teknis yang tergabung dalam KKLP maupun pegawai administratif yang mendukung terselenggaranya roda organisasi.

Berkaita dengan penyusunan indeks pembangunan bidang kebahasaan, perlu ditempuh langkah-langkah sistematis dalam mewujudkan indeks yang akan digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan bidang kebahasaan ini. Penyusunan indeks diagendakan pada tahun awal tahun 2023 sehingga dapat digunakan sebagai indikator kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ketika menyusun rencana strategis pada periode 2025--2029.

Berkaitan dengan evaluasi program, perlu dilakukan analisis evaluatif untuk mengetahui pencapaian dan permasalahan dalam melaksanakan program sepanjang tahun 2020—2024. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kongres bahasa Indonesia dari tahun ke tahun. Momentum akhir Renstra tahun 2024 digunakan untuk melakukan evaluasi besar terhadap program kebahasaan dan kesastraan sebagai pijakan kokoh dalam perencanaan Renstra periode setelahnya.

#### **3.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Bahasa Provinsi Papua**

Arah kebijakan dan strategi Balai Bahasa Provinsi Papua mengacu kepada arah kebijakan dan strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu mendorong tercapainya sasaran strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui strategi pencapaian sasaran kegiatan berbasis Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP). Platform ini merupakan upaya fungsionalisasi para tenaga fungsional di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Papua agar dapat bekerja secara optimal sesuai dengan minat dan kepakarannya dalam suatu bidang keahlian dan layanan profesional kebahasaan dan kesastraan tertentu.



No.	Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kemdikbudristek	Arah Kebijakan BPP Bahasa	Arah Kebijakan BBP Papua	Strategi Pencapaian SK berbasis KKLP			
					Sasaran Kegiatan		Pelaksana	
1	Peningkatan budaya literasi	Pengarutamaan bahasa dan kebudayaan dalam pendidikan	Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan	Mendorong tercapainya sasaran strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	1.	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	1.	KKLP Perkamusan dan Peristilahan
					2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	2.	KKLP Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia
					3.	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	3.	KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum
					4.		4.	KKLP Literasi
2	Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	Penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional	Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional		4.	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	5.	KKLP BIPA
					5.	Tersedianya produk diplomasi bahasa	6.	KKLP Penerjemahan
		Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan	Pelindungan bahasa daerah		6.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra	7.	KKLP Pellindungan dan Pemodernan



Dalam memberikan layanan kebahasaan dan kesastraan, Balai Bahasa Provinsi Papua berpedoman pada motto



PAPEDA merupakan makanan tradisional Papua berupa bubur sagu, biasanya dicampur dengan ikan dan sayur. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi

Filosofi PAPEDA: bahwa Balai Bahasa Provinsi Papua dalam memberikan pelayanan menghargai kekhasan daerah; mampu menjadi teman dan sahabat; jujur, bersih, dan bebas KKN; mampu menjadi perekat perbedaan; tanpa pamrih; dan berorientasi pada mutu

### 3.2 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Bahasa Provinsi Papua membutuhkan kerangka regulasi sebagai landasan hukum formal. Perincian mengenai jenis kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan Balai Bahasa Provinsi Papua dijelaskan dalam tabel berikut.

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian
1.	RSKKNI bidang pengajaran BIPA	Penguatan tentang Standar Kompetensi Pengajar BIPA	2022
2.	Peraturan tentang standar penyelenggaraan program BIPA	Penguatan regulasi yang mengatur standar penyelenggaraan program BIPA	2024
3.	Peraturan tentang peta jalan internasionalisasi bahasa Indonesia	Sebagai rujukan pelaksanaan program penginternasionalan bahasa Indonesia	2023
4.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penerjemah Teks Sastra	Penjaminan mutu penerjemah dan terjemahan teks sastra	2022
5.	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Penerjemahan dan Penjurubahasaan	Pelaksanaan aturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional dalam bidang penerjemahan dan penjurubahasaan	2023
6.	Revisi Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	UKBI masih bersifat imbauan dan belum diwajibkan bagi masyarakat Indonesia yang berpendidikan dan berbudaya	2023
7.	Peraturan tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia	Penguatan kebijakan BPP Bahasa dalam pengawasan bahasa untuk melaksanakan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia	2023
8.	Peraturan tentang Pedoman dan Acuan Kebahasaan	Penyempurnaan PUEBI, PUPI, dan pedoman lainnya	2022
9.	Revisi PP Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pengurangan tarif mahasiswa dan penyesuaian tarif penutur asing	2023
10.	Peraturan tentang tarif PNBP di lingkungan Kemendikbudristek	Penambahan tarif nol dalam PNBP UKBI sangat penting untuk mewujudkan peningkatan kemahiran mahasiswa dan pemangku kebijakan	2023
11.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pekamus dan Penata Istilah	Penguatan kebijakan BPP Bahasa dalam fungsi pengembangan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah	2024
12.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pembaku dan Pengodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia	Pentingnya aturan mengenai Standar Kompetensi Penyusun Kaidah Bahasa Indonesia	2024



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian
13.	Revisi Permendikbud 44 Nomor 2020 tentang Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kemendikbudristek	Penambahan sasaran penerima banpem agar mencakupi juga komunitas kebahasaan dan kesastraan	2022
14.	Perpres tentang Pembudayaan Literasi	Tindaklanjut UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, serta PP Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017	2024
15.	Permendikbudristek tentang pedoman kebutuhan jabatan fungsional Widyabasa	Sebagai pedoman bagi unit kerja dalam melakukan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Widyabasa	2022
16.	Perpres tentang tunjangan fungsional Widyabasa	Sebagai acuan menentukan besaran jumlah tunjangan fungsional jabatan fungsional Widyabasa	2023
17.	Permendikbudristek tentang uji kompetensi jabatan fungsional Widyabasa	Sebagai acuan terkait kompetensi yang dibutuhkan pegawai untuk menduduki jabatan fungsional Widyabasa	2022
18.	Permendikbudristek tentang pedoman <i>inpassing</i> jabatan fungsional Widyabasa	Sebagai acuan dalam menentukan proses <i>inpassing</i> jabatan fungsional Widyabasa	2022
19.	Peraturan Daerah tentang perlindungan bahasa daerah	Sebagai dasar pelaksanaan program perlindungan bahasa daerah di daerah	2024

### 3.3 Kerangka Kelembagaan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Bahasa Provinsi Papua sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek menjadi lembaga strategis dalam pembentukan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul dan berdaya saing melalui pengembangan,

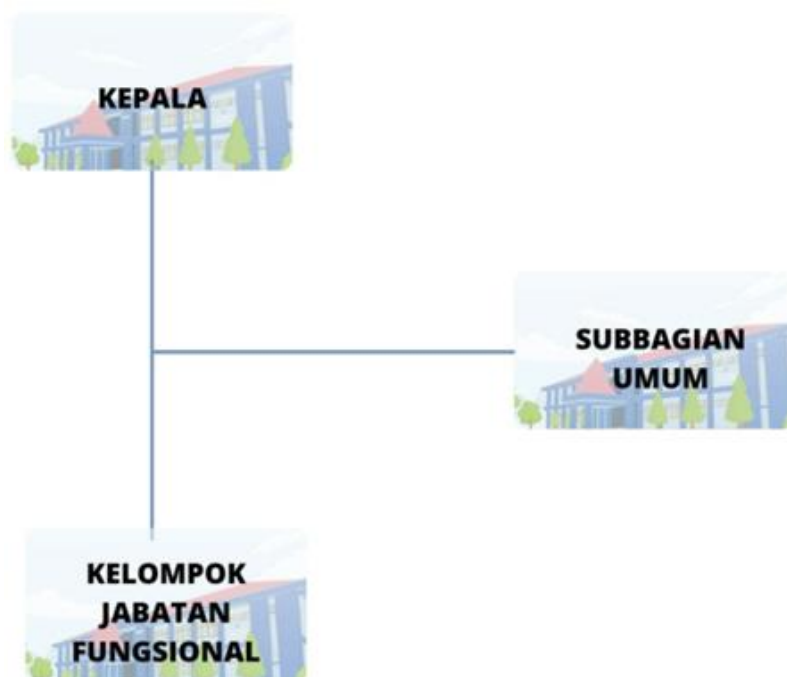


pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra. Oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Papua harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran kegiatan, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi.

Balai Bahasa Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dipimpin oleh satu orang kepala dibantu Kepala Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### 3.3.1 Struktur Organisasi

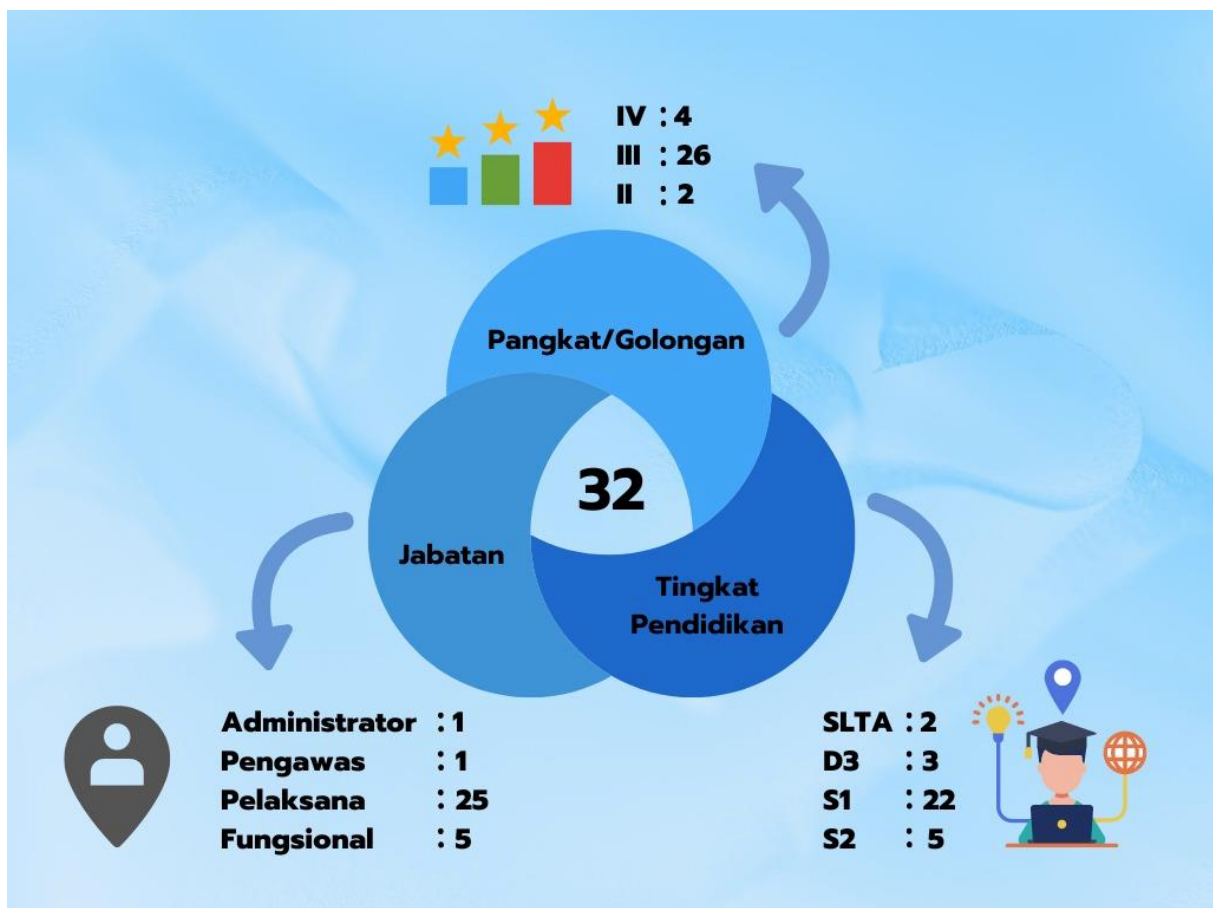
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa, Struktur Organisasi Balai Bahasa Provinsi Papua seagai berikut.





### 3.3.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Balai Bahasa Provinsi Papua didukung oleh sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 32 orang. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Balai Bahasa Provinsi Papua terdiri atas pejabat struktural sebanyak 2 orang yaitu 1 orang pejabat administrator dan 1 orang pejabat pengawas, fungsional sebanyak 5 orang, dan pelaksana sebanyak 25 orang. Dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai dengan tingkat pendidikan S-2 sebanyak 5 orang, S-1 sebanyak 22 orang, D-3 sebanyak 3 orang, dan SLTA sebanyak 2 orang. Berdasarkan pangkat/golongan diketahui pegawai golongan IV sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 26 orang, dan golongan II sebanyak 2 orang. Secara rinci, kondisi pegawai negeri sipil di Balai Bahasa Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Selain didukung oleh 32 orang PNS, Balai Bahasa Provinsi Papua juga didukung oleh 7 orang PPNPN yang terdiri dari 3 orang petugas keamanan dan 4 orang pramubakti.

Dari total 39 SDM yang dimiliki Balai Bahasa Provinsi Papua dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, ketersediaan SDM tersebut dinilai masih kurang karena sesuai peta jabatan yang ada kebutuhan ideal jumlah SDM Balai Bahasa Provinsi Papua adalah 60 orang.

### 3.3.3 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal Kemendikbud merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbud. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Balai Bahasa Provinsi Papua juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yaitu:

1. Manajemen Perubahan
2. Penguatan Pengawasan
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4. Penguatan Kelembagaan
5. Penguatan Tata Laksana
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



Program Kerja yang ditetapkan Balai Bahasa Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2020—2024 antara lain.

No	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI-WBK/WBBM					
2.	Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama menuju Zi-WBK					
3.	Pembentukan Unit Layanan Terpadu					
4.	Pengembangan fitur ULT pada situs web Balai Bahasa Provinsi Papua					
5.	Penyusunan Standar Pelayanan Balai Bahasa Provinsi Papua					
6.	Mereviu dan merevisi Standar Pelayanan					



# BAB IV

## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



## 4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Balai Bahasa Provinsi Papua menetapkan sasaran-sasaran yang merupakan kondisi yang ingin dicapai dari pembangunan bidang kebahasaan. Keberhasilan sasaran diukur dengan indikator-indikator kinerja. Di bab ini sasaran dan indikator kinerja ditampilkan berdasarkan dua periode pelaksanaan, yaitu (1) Sasaran dan indikator tahun 2020—2021 dan (2) Sasaran dan indikator tahun 2022—2024.

### 4.1.1 Sasaran dan Indikator Tahun 2020—2021

Pada periode 2020—2021, terdapat sasaran dan indikator serta target kinerja sebagai berikut.

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Capaian	
				2020	2021
1	Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	1.1 Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	Kosakata	2000	1000
2	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	2.1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian	Dokumen	1	14
3	Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	3.1 Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	Lembaga	110	50
4	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	4.1 Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	Orang	1700	704
5	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	5.1 Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah kritis dan terancam punah	Orang	120	60



Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target Capaian	
					2020	2021
		5.2	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah	Orang	120	180
		5.3	Jumlah produk kesastraan terkembangkan	Produk	2	6
6	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	6.1	Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB
		6.2	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91	Skor	91	92

#### 4.1.2 Sasaran dan Indikator Tahun 2022—2024

Pada periode 2022—2024, terdapat sasaran dan indikator serta target kinerja sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Tahun		
					2022	2023	2024
1	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	1.1	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	2	2	2
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	2.1	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	Orang	358	700	723
3	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	3.1	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	Lembaga	45	45	45
		3.2	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	Lembaga	15	15	15



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Tahun		
					2022	2023	2024
4	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	4.1	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	Orang	25	25	25
5	Tersedianya produk diplomasi bahasa	5.1	Jumlah produk penerjemahan	Produk	2	12	12
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra	6.1	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	Orang	22	274	274
7	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Papua	7.1	Predikat SAKIP Balai Bahasa Papua	Predikat	BB	BB	BB
		7.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Papua	Skor	91	91	91

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka menjalankan amanat pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, diperlukan kerangka pendanaan yang memadai. Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan pendanaan fungsi pendidikan. Salah satu ketentuan tersebut berkaitan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang mengubah struktur program dan kegiatan kementerian/lembaga. Berkaitan dengan hal di atas, kerangka pendanaan Balai Bahasa Provinsi Papua tahun 2020—2024 dibagi ke dalam dua periode berikut ini.



#### 4.2.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2020—2021

Pada periode 2021—2022, terdapat kerangka pendanaan dalam upaya pencapaian sasaran kegiatan Balai Bahasa Provinsi Papua sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Pagu (ribu)	
				2020	2021
1	Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	1.1	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	82.312	322.524
2	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	2.1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian	494.950	538.038
3	Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	3.1	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	540.058	266.950
4	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	4.1	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	3.446.209	698.628
5	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	5.1	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah kritis dan terancam punah	95.065	184.176
		5.2	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah	95.065	389.240
		5.3	Jumlah produk kesastraan dikembangkan	65.360	220.450
6	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	6.1	Predikat SAKIP Satker minimal BB	1.141.152	30.000
		6.2	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91	4.461.342	5.206.192





#### 4.2.2 Sasaran dan Indikator Tahun 2022—2024

Pada periode 2022—2024, terdapat kerangka pendanaan dalam upaya pencapaian sasaran kegiatan Balai Bahasa Provinsi Papua sebagai berikut.

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (ribu)		
				2022	2023	2024
1	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	1.1	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	132.228	136.194	140.280
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	2.1	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	379.839	801.843	839.176
3	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	3.1	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	241.896	249.153	256.627
		3.2	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	143.409	147.711	152.143
4	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	4.1	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	113.043	116.434	119.927
5	Tersedianya produk diplomasi bahasa	5.1	Jumlah produk penerjemahan	50.000	298.700	307.661
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra	6.1	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	128.006	1.048.845	1.084.651
7	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Papua	7.1	Predikat SAKIP Balai Bahasa Papua	759.421	878.918	905.286
		7.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Papua	4.164.382	4.084.066	3.918.960



# BAB V

## PENUTUP



Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Papua Tahun 2020—2024 ini merupakan gambaran dari kebijakan pembangunan jangka menengah dalam bidang kebahasaan dan kesastraan. Dokumen rencana strategis ini merupakan penjabaran dari (1) Rencana pembangunan jangka menengah nasional/RPJMN (Kepres No. 18 Tahun 2020), (2) Rencana Strategis Kemendikbudristek (Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022), dan Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Rencana Strategis ini menjabarkan visi dan misi Presiden beserta sasaran nasional. Dalam dokumen ini digambarkan keterkaitan antara agenda pembangunan nasional, sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Dalam implementasinya, rencana strategis ini digunakan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Papua. Selain itu, dokumen ini dapat pula dijadikan pedoman oleh pemangku kepentingan kebahasaan dan kesastraan, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun masyarakat. Dengan demikian, berbagai pihak dapat terlibat secara aktif, efektif, dan konstruktif dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

Guna meningkatkan kinerja program dan kegiatan, semua pihak dapat memberikan kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata. Dengan melibatkan publik secara lebih aktif dan terintegrasi, diharapkan kualitas pengelolaan bahasa dan sastra semakin meningkat sehingga dapat berkontribusi positif dalam menjaga kebinekaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.



# LAMPIRAN



## DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PERHITUNGAN

**SK** : [SK1] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra  
**IKK** : [IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra

### Definisi

Produk pengembangan bahasa adalah produk hasil kodifikasi norma kebahasaan yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan/atau bersama UPT untuk menjadi acuan kebahasaan dan pedoman dalam penyusunan tata bahasa, tata aksara (ejaan), kamus, ensiklopedia, tesaurus, glosarium, korpus, dan acuan kebahasaan lain. Manfaat produk pengembangan bahasa adalah sebagai standar dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara, produk pengembangan sastra adalah produk yang dihasilkan melalui penyusunan bahan pengembangan sastra dan acuan kesastraan lain sehingga dapat digunakan secara lebih meluas dan dapat diakses secara lebih cepat oleh masyarakat. Bentuk-bentuk produk pengembangan sastra berupa, antara lain, buku prosiding, buku bunga rampai, jurnal ilmiah, buku ilmiah, buku acuan, buku pedoman, buku pengayaan pembelajaran sastra, produk alih wahana, dan produk digitalisasi sastra (vlog, video, pangkalan data sastra). Manfaat dari produk-produk pengembangan sastra, antara lain, memberi rekomendasi kepada pemangku kepentingan, menyampaikan informasi kesastraan kepada masyarakat, menyediakan bahan pengayaan pembelajaran sastra di sekolah dan di perguruan tinggi, serta pengembangan ilmu pengetahuan humaniora.

### Metode Penghitungan

Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang dihasilkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua pada tahun tertentu.

Satuan: Produk  
Tipe Penghitungan: Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Internal  
Periode Pengumpulan Data: Tahunan

### Penanggung Jawab

KKLP Perkamusan dan Peristilahan



- SK : [SK 2] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan**
- IKK : [IKK 2.1] Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan**

### Definisi

---

Jumlah penutur bahasa Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan dalam kegiatan, antara lain, peningkatan kemahiran berbahasa, peningkatan apresiasi sastra, pengujian kemahiran berbahasa Indonesia, dan pembinaan literasi generasi muda. Penutur Bahasa Indonesia adalah penutur bahasa yang karena profesi dan jabatannya menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Bentuk pembinaan dilakukan dengan, antara lain, (1) memberikan materi kebahasaan dan kesastraan, (2) memberikan bimbingan teknis praktik baik literasi baca tulis bagi generasi muda, serta (3) melaksanakan pengujian dan pelatihan kemahiran berbahasa Indonesia. Manfaat pembinaan ialah meningkatnya kualitas berbahasa Indonesia para penutur bahasa Indonesia yang terbina.

### Metode Penghitungan

---

Hasil penjumlahan seluruh peserta kegiatan pembinaan penutur bahasa Indonesia. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut

$$JPT = \sum P$$

Keterangan:

JPT = Jumlah Penutur terbina

P = Peserta kegiatan

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Nonkumulatif

### Sumber Data

---

Laporan Internal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

### Penanggung Jawab

---

KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum, KKLP Literasi, dan KKLP UKBI



<b>SK</b>	<b>: [SK 3] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan Indonesia</b>
<b>IKK</b>	<b>: [IKK 3.1] Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya</b>

### **Definisi**

---

Jumlah lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui pendampingan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa di lembaga tersebut. Lembaga adalah unit sasaran pembinaan penggunaan bahasa negara. Tiga kategori untuk lembaga yang dijadikan sasaran ialah lembaga pendidikan, lembaga satuan kerja pemerintah, dan lembaga usaha berbadan hukum Indonesia (swasta). Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi audiensi, sosialisasi berupa pemberian materi, pendampingan atau asistensi perbaikan penggunaan bahasa pada lembaga, serta pemantauan/evaluasi dan pemberian penghargaan.

### **Metode Penghitungan**

---

Hasil penjumlahan lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.

$$JLT = \sum L$$

Keterangan:

JLT = Jumlah lembaga terbina

L = Lembaga yang dibina

Satuan: Lembaga

Tipe Penghitungan: Kumulatif

### **Sumber Data**

---

Laporan Internal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

### **Penanggung Jawab**

---

KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum



**SK : [SK 3] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan**  
**IKK : [IKK 3.2] Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina**

### Definisi

Jumlah komunitas penggerak literasi di Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Komunitas penggerak literasi adalah perkumpulan sosial (di luar pendidikan formal) yang terdiri atas beberapa orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam hal menulis dan membaca beserta kegiatan yang menyertainya (pendampingan, praktik baik, dan bimbingan teknis). Komunitas tersebut dikenal di lingkungannya, memiliki nama diri komunitas, memiliki tempat beraktivitas, memiliki struktur kepengurusan, dan memiliki program kerja. Adapun tujuan adanya komunitas penggerak literasi adalah untuk meningkatkan minat baca dan mewujudkan masyarakat yang literat. Bentuk pembinaan yang dilakukan Balai Bahasa Provinsi Papua ialah dengan, antara lain, (1) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat dini dan mendasar; (2) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat menengah atau tingkat atas; (3) penyelenggaraan dan praktik baik literasi di komunitas penggerak literasi; (4) pemanfaatan enam literasi dasar untuk kecakapan hidup (literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan); (5) pemanfaatan bahasa Indonesia dalam industri kreatif; (6) pelatihan bagi pengelola komunitas literasi; serta (7) pemberian fasilitasi lain dalam mendukung pelaksanaan literasi kebahasaan dan kesastraan. Manfaat yang diharapkan dari pembinaan tersebut adalah meningkatnya kompetensi khusus anggota penggerak literasi dalam bidang kompetensi literasi.

### Metode Penghitungan

Hasil penjumlahan komunitas penggerak literasi yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua.

Satuan: Lembaga  
Tipe Penghitungan: Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Internal  
Periode Pengumpulan Data: Tahunan

### Penanggung Jawab

KKLP Literasi





**SK : [SK 4] Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA**

**IKK : [IKK 4.1] Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)**

---

### Definisi

---

Jumlah pemelajar BIPA yang belajar bahasa Indonesia secara formal, nonformal, dan informal di dalam dan luar negeri. Pemelajar BIPA adalah penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia di dalam dan luar negeri.

---

### Metode Penghitungan

---

Jumlah akumulasi pemelajar BIPA yang terlayani, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh fasilitasi program BIPA Balai Bahasa Provinsi Papua melalui lembaga.

Satuan: orang

Tipe penghitungan: Kumulatif

---

### Sumber Data

---

Laporan Internal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

---

### Penanggung Jawab

---

KKLP BIPA



- SK : [SK 5] Tersedianya produk diplomasi bahasa Indonesia**  
**IKK : [IKK 5.1] Jumlah produk penerjemahan**

### Definisi

Produk penerjemahan adalah buku dan/atau dokumen yang dihasilkan dari pengalihbahasaan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran (dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya, serta dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah dan/atau sebaliknya). Produk penerjemahan merupakan bentuk produk diplomasi kebahasaan yang berfungsi mendukung kepentingan strategis negara dan pemerintah sekurang-kurangnya untuk (1) mendukung penginternasionalan bahasa Indonesia melalui pemajanan bahasa Indonesia di dunia internasional, (2) memberikan pemahaman tentang nilai keindonesiaan kepada masyarakat internasional, (3) mempercepat penyerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta peradaban dunia, (4) melestarikan kearifan lokal dan mengembangkannya di tingkat nasional, serta (5) meningkatkan pemerataan akses informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, produk penerjemahan dihasilkan dari kegiatan (1) penerjemahan buku ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta karya sastra dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (2) penerjemahan dokumen negara dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (3) penerjemahan buku dan dokumen dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, (4) penerjemahan dan pengalihaksaraan manuskrip atau prasasti dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia.

### Metode Penghitungan

Hasil penjumlahan produk penerjemahan yang dihasilkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua.

Satuan: Produk  
Tipe Penghitungan: Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Internal  
Periode Pengumpulan Data: Tahunan

### Penanggung Jawab

KKLP Penerjemahan



- SK : [SK 6] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah Indonesia**
- IKK : [IKK 6.1] Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah**

### Definisi

Partisipan perlindungan bahasa dan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan bahasa dan sastra. Menurut PP Nomor 57 Tahun 2014, perlindungan bahasa dan sastra adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian sastra, melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. Kegiatan perlindungan yang dimaksud mencakup konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua yang merupakan salah satu UPT Badan Bahasa.

Konservasi bahasa merupakan kegiatan perlindungan yang keluarannya adalah dokumentasi bahasa, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah dokumen sistem tata bahasa (fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi) yang menjadi dasar penyusunan bahan ajar untuk kegiatan revitalisasi. Sementara revitalisasi bahasa merupakan upaya peningkatan daya hidup bahasa daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda.

Konservasi sastra merupakan kegiatan perlindungan yang keluarannya adalah dokumentasi sastra, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah deskripsi lengkap mengenai sastra lisan mulai dari teks, konteks, dan koteks, deskripsi dan transliterasi manuskrip, dan deskripsi sastra cetak berbahasa daerah. Bersama dengan rekaman audio-visual, dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi merupakan bahan ajar yang akan dipergunakan dalam kegiatan revitalisasi.

Sementara revitalisasi sastra merupakan upaya peningkatan daya hidup sastra lisan daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda. Indikator partisipan perlindungan bahasa sastra diturunkan dari PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, yaitu anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam pendidikan, pendataan, revitalisasi, dan dokumentasi.

Partisipan perlindungan bahasa yang terlibat dalam konservasi bahasa merupakan penutur bahasa yang menjadi narasumber/informan dalam kegiatan konservasi bahasa, baik berupa penyusunan sistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi maupun dalam perekaman audio-visual.

Partisipan perlindungan bahasa yang terlibat dalam revitalisasi bahasa merupakan penutur bahasa yang menjadi pengajar/pembelajar dalam revitalisasi bahasa. Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam perlindungan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua, baik sebagai penutur, seniman tradisi, maupun masyarakat pemilik sastra.



Konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua, baik sebagai penutur, seniman tradisi, maupun masyarakat pemilik sastra. Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam konservasi sastra merupakan maestro, penutur tradisi, seniman tradisi, budayawan, masyarakat pemilik manuskrip, serta sastrawan yang menjadi narasumber/informan dalam kegiatan konservasi sastra, baik berupa konservasi sastra lisan, konservasi manuskrip, maupun konservasi sastra cetak. Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam revitalisasi sastra merupakan penutur dan seniman tradisi yang menjadi pengajar/pembelajar dalam revitalisasi sastra lisan.

### Metode Penghitungan

---

Hasil penjumlahan anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perlindungan bahasa dan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua.

$$A = B + C$$

Keterangan:

A = Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra

B = Jumlah partisipan perlindungan bahasa

C = Jumlah partisipan perlindungan sastra

$$B = M + N$$

Keterangan:

B = Jumlah partisipan perlindungan bahasa

M = Jumlah penutur bahasa yang terlibat sebagai informan/narasumber dalam kegiatan konservasi

N = Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi bahasa

$$C = X + Y$$

Keterangan:

C = Jumlah partisipan perlindungan sastra

X = Jumlah pelaku atau pemilik sastra yang terlibat sebagai informan/narasumber dalam kegiatan konservasi

Y = Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi sastra

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Kumulatif

### Sumber Data

---

Laporan Internal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

### Penanggung Jawab

---

KKLP Pelindungan dan Pemodernan



**SK : [SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Papua Indonesia**  
**IKK : [IKK 7.1] Predikat SAKIP Balai Bahasa Papua**

### Definisi

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

### Metode Penghitungan

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai SAKIP= [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran Kinerja] + [Pelaporan Kinerja] +  
[Evaluasi Kinerja]

Satuan: Predikat

Tipe Penghitungan: Nonkumulatif

### Sumber Data

Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek  
Periode Pengumpulan Data: Tahunan

### Penanggung Jawab

Tim SAKIP



<b>SK</b>	<b>: [SK 7] Meningkatkan tata kelola Balai Bahasa Papua Indonesia</b>
<b>IKK</b>	<b>: [IKK 7.2] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Papua</b>

### Definisi

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 / PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%

Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya.

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan

### Metode Penghitungan

Nilai Kinerja Anggaran:

Nilai IKPA [40%] + Nilai EKA [60%]

Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja

>90% Sangat Baik

>80%-90% Baik

>60%-80% Cukup

>50%-60% Kurang

<%50 Sangat Kurang

Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data



1. Aplikasi SMART DJA (EKA)
2. Aplikasi OM SPAN (IKPA)

### **Penanggung Jawab**

---

Subbagian Umum



CASCADING RENSTRA DAN PK  
BALAI BAHASA PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2022—2024

SS	IKSS	SP	IKP	SK	IKK	KRO	RO	KOMPONEN	PENGAMPU		
Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	3.1 Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	3.1.1 Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkatkan kualitas berbahasanya	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	3.1.1.1 Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	2021.DDA	2021.DDA.001	2021.DDA.001.052	Pemerayaan Kosakata	Pusbanglin dan UPT	
							2021.DDA.002	2021.DDA.001.053	Pengembangan Kamus	Pusbanglin dan UPT	
							2022.DDA.003		Produk pengembangan sastra	Pusbanglin	
							2022.DDA.004		Produk pengayaan pendukung literasi	Pusbin	
							2022.QDC.001	2022.QDC	2022.QDC.001.054	Peningkatan Kemahiran Berbahasa	Pusbin dan UPT
							2022.QDC.002		2022.QDC.001.055	Peningkatan Apresiasi Sastra	Pusbin dan UPT
							2022.QDC.003	2022.QDC	2022.QDC.002.052	Pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka	Pusbin dan UPT
							2022.QDC.004		2022.QDC.003.051	Pemilihan Duta Bahasa penggerak literasi	Pusbin dan UPT*
							2022.QDC.005		2022.QDC.003.052	Pembinaan literasi generasi muda	Pusbin dan UPT*
							2022.BDB.001	2022.BDB	2022.BDB.001.051	Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum	Pusbin dan UPT
							2022.BDB.002		2022.BDB.001.053	Pelayanan Profesional terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik	Pusbin dan UPT
							2022.BDB.003		2022.BDB.002.051	Permutakhiran profil komunitas penggerak literasi	Pusbin dan UPT
2022.BDB.004		2022.BDB.002.052	Pemberdayaan komunitas penggerak literasi	Pusbin dan UPT							
2022.QDB.001	6702.QDB	6702.QDB.001	Lembaga Terfasilitasi Program BIPA	Pustanda dan UPT							
2022.QDB.002		6702.QDB.001.054	Pelaksanaan program BIPA	Pustanda dan UPT							
2022.QDB.003		6702.QDB.002.052	Pelaksanaan Penerjemahan	Pustanda dan UPT							
2021.LDC.001	2021.LDC	2021.LDC.001	Model perlindungan bahasa	Pusbanglin							
2021.LDC.002		2021.LDC.002	Model Pelindungan Sastra	Pusbanglin							





SS	IKSS	SP	IKP	SK	IKK	KRO	RO	KOMPONEN	PENGAMPU	
3.2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	2021.QDC.001	Partisipan perlindungan bahasa	2021.QDC.001.051 Koordinasi antarinstansi dalam rangka implementasi model perlindungan bahasa daerah	UPT	
			3.2.8	3.2.8.2		2021.QDC.002	Partisipan perlindungan sastra	2021.QDC.001.052 Pemberdayaan pelaku sastra dalam mengimplementasikan model perlindungan bahasa daerah	UPT	
5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Papua	Predikat SAKIP Balai Bahasa Papua	2020.EBA	Layanan Umum	2020.EBA.962.051 Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perencanaan	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT	
			5.3.11	5.3.11.1		2020.EBA.962		2020.EBA.962.052 Pelayanan Perpustakaan	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT	
									2020.EBA.962.053 Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT
									2020.EBA.962.054 Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT
									2020.EBA.962.055 Pelayanan Barang Milik Negara	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT
									2020.EBA.962.056 Pelayanan SDM	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT
									2020.EBA.962.057 Pelayanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT
									2020.EBA.962.058 Pelayanan Kehumasan dan Publikasi	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT
									2020.EBA.962.059 Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT
										2020.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan
								2020.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT	
								2020.EBB.951.995 Pengadaan Kendaraan	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT	
								2020.EBB.951.996 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT	
								2020.EBB.951.997 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT	
								2020.EBB.971.998 Rehab/Renovasi Gedung Bangunan	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT	



## MATRIKS SEMULA-MENJADI SASARAN DAN INDIKATOR

Semula			Menjadi		
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	1.	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra
2.	Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia	Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan			
3.	Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	2.	Terbinanya lembaga Lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina
4.	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan
			4.	Meningkatnya Jumlah pemelajar BIPA	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)
5.	Terlindunginya bahasa dan Sastra daerah yang kritis dan terancam	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan	5.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah	Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah
6.	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat SAKIP Satker minimal BB Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	6.	Tersedianya produk diplomasi bahasa	Jumlah produk penerjemahan
			7.	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Papua	Predikat SAKIP Balai Bahasa Papua Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Papua





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**BALAI BAHASA PROVINSI PAPUA**

Jalan Yoka, Waena, Heram, Jayapura, Papua  
Telepon: (0967) 574154 Faksimile: (0967) 574171  
Laman: [balaibahasapapua.kemdikbud.go.id](http://balaibahasapapua.kemdikbud.go.id)



[balaibahasapapua](https://www.instagram.com/balaibahasapapua)



[@bbhspapua](https://twitter.com/bbhspapua)



[balai bahasa papua](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[Balai Bahasa Provinsi Papua](https://www.facebook.com/BalaiBahasaProvinsiPapua)